



## Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022

Rismatur Rahmadillah, Nufaisa  
Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 2024,05-13

Revised: 2024, 05-24

Accepted: 2024,05-25

#### Keywords:

Keyword retribusi daerah,  
Keyword dana alokasi umum,  
Keyword dana alokasi khusus.

### ABSTRACT

#### Abstract:

The regional autonomy system is undergoing reform and has provided support to local governments to plan and implement various initiatives to improve community services. This includes transferring power from provincial governments to local governments, facilitating local resource allocation. This research aims to examine the influence of Regional Levies, General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) on the Human Development Index in East Java Province in 2019 - 2022. This research uses a quantitative method approach. The sample in the study consisted of 15 districts/cities. In East Java Province, this was obtained through a purposive sampling method. The analytical method used is panel data regression which is processed using eviews 10 software, by carrying out classical assumption tests and hypothesis tests before determining the best model test. The results of this study show that partially Regional Levy does not have a significant effect on the Human Development Index, while the General Allocation Fund and Special Allocation Fund have a significant effect on the Human Development Index. Apart from that, regional levies, general allocation funds (DAU) and special allocation funds (DAK) simultaneously have an effect on the Human Development Index. This research provides suggestions to the local government to increase development for community welfare, so that the Human Development Index (HDI) in East Java Province increases every year.

#### Abstrak:

Sistem otonomi daerah mengalami reformasi dan telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Hal ini mencakup transfer kekuasaan dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah, memfasilitasi alokasi sumber daya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2019 - 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Sampel pada penelitian terdapat sebanyak 15 Kabupaten/kota. Di Provinsi Jawa Timur, yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang diolah menggunakan software eviews 10, dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis sebelum menuntukkan uji model terbaik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, secara simultan Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini memberikan saran kepada pihak pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur meningkat setiap tahunnya.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



#### Corresponding Author:

Rismatur Rahmadillah

Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat Afiliasi

[08020120063@student.uinsby.ac.id](mailto:08020120063@student.uinsby.ac.id)

## Pendahuluan

Era otonomi daerah kini memulai trobosan baru dalam sistem pemerintahan sejak reformasi pada periode 1998. Perubahan sistem memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai inisiatif demi kesejahteraan masyarakatnya Menurut (Lestari et al., 2019) tentang pemerintahan daerah, tugas pendelegasian adalah penugasan Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Demikian pula, dapat juga datang dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk melaksanakan isu-isu tata kelola tertentu dalam yurisdiksi provinsi. Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya lokal yang ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, sepanjang sejalan dengan tujuan nasional.

Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali sumber daya keuangannya sendiri, dengan tujuan meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Contoh sumber daya daerah yang dapat digali ialah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan mayoritas sumber keuangan daerah, didukung oleh kebijakan yang mengatur distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, selaras dengan sistem pemerintahan negara (Martini, R. R. & Zailah, 2019).

Upaya peningkatan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan, dengan tujuan meningkatkan pemberian pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya, seperti retribusi daerah dan pajak daerah, yang merupakan program krusial yang dilaksanakan pada seluruh tingkatan kewenangan pemerintah daerah terkait yang terkait dengan pendapatan atau penerimaan daerah (Arezda, 2022). Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk dari penerimaan atau pendapatan daerah, Retribusi daerah ialah salah satu sumber pendapatan daerah yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap pembiayaan otonomi daerah. Kapasitas retribusi daerah pada setiap daerah menjadi salah satu indikator kesiapan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom. Oleh karena itu, pemungutan retribusi daerah direkomendasikan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk memfasilitasi otonomi daerah, yang secara konseptual bertujuan untuk memiliki kapasitas dan tanggung jawab yang nyata (Putriani, 2016).

Selain Pendapatan Asli Daerah, untuk mengendalikan tingkat Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan juga memberikan peranan dalam hal ini. Dana Perimbangan merupakan sejumlah uang yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, sebagai dana pembangunan. Dana perimbangan yang dirumuskan meliputi Dana Alokasi Pendapatan (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah (*horizontal imbalance*) (Novarianti, 2016).

Terdapat salah satu fenomena yang berada di Kabupaten Sidoarjo yaitu, pada tahun 2020 Penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo menurun. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor-faktor dari adanya larangan saat terjadi Covid -19. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung secara terus menerus mulai tahun 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo mulai meningkat realisasinya pun telah meningkat sebesar Rp 1,215 triliun. Tentu saja adanya peningkatan penerimaan daerah tersebut akan direalisasikan untuk pengembangan infrastruktur. Dapat dicermati bahwa beberapa tahun kebelakang infrastruktur pada Kabupaten Sidoarjo kurang. Dengan peningkatan penerimaan daerah tersebut Bupati Sidoarjo mulai melakukan pengembangan infrastruktur yang memadai, maka investasi akan meningkat dan memulihkan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo (Eko, 2023).

Maka dari itu, peningkatan pendapatan daerah, seperti pendapatan daerah dan dana perimbangan, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya untuk membiayai dan memenuhiantisipasi kebutuhan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai standar pembangunan manusia. Keberhasilan dari pembangunan manusia dapat dinilai melalui permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar dan dapat teratasi. Masalah-masalah tersebut mencakup kemiskinan, gizi buruk pada balita, buta huruf, dan pengangguran (Lestari et al., 2019). *Human Development Index* (HDI), Biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pembangunan manusia (Muqorrobin, 2017).

Pada umumnya nilai Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun mengalami kenaikan tetapi tingkatan kategorinya tergolong baik. Dapat dibuktikan pada gambar 1.3 dibawah seperti berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2019 - 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2019 - 2022				
Kabupaten/Kota di Jawa Timur	IPM			
	2019	2020	2021	2022
Pacitan	68,16	68,39	68,57	69,37
Ponorogo	70,56	70,81	71,06	71,87
Trenggalek	69,46	69,74	70,06	71,00
Tulungagung	72,62	73,00	73,15	74,06
Blitar	70,57	70,58	71,05	71,86
Kediri	71,85	72,05	72,56	73,46
Malang	70,35	70,36	70,60	71,38
Lumajang	65,33	65,46	66,07	66,95
Jember	66,69	67,11	67,32	67,97
Banyuwangi	70,60	70,62	71,38	71,94
Bondowoso	66,09	66,43	66,59	67,31
Situbondo	67,09	67,38	67,78	68,25
Probolinggo	65,60	66,07	66,26	66,96
Pasuruan	68,29	68,60	68,93	69,68
Sidoarjo	80,05	80,29	80,65	81,02
Mojokerto	73,53	73,83	74,15	74,89
Jombang	72,85	72,97	73,45	74,05
Nganjuk	71,71	71,72	71,97	72,93
Madiun	71,69	71,73	71,88	72,39
Magetan	73,49	73,92	74,15	74,85
Ngawi	70,41	70,54	71,04	71,75
Bojonegoro	68,75	69,04	69,59	70,12
Tuban	68,37	68,40	68,91	69,67
Lamongan	72,57	72,58	73,12	74,02
Gresik	76,10	76,11	76,50	77,16
Bangkalan	63,79	64,11	64,36	65,05
Sampang	61,94	62,70	62,80	63,39
Pamekasan	65,94	66,26	66,40	66,99
Sumenep	66,22	66,43	67,04	67,87
Kota Kediri	78,08	78,23	78,60	79,59
Kota Blitar	78,56	78,57	78,98	79,93
Kota Malang	81,32	81,45	82,04	82,71
Kota Probolinggo	73,27	73,27	73,66	74,56
Kota Pasuruan	75,25	75,26	75,62	76,54
Kota Mojokerto	77,96	78,04	78,43	79,32
Kota Madiun	80,88	80,91	81,25	82,01
Kota Surabaya	82,22	82,23	82,31	82,74
Kota Batu	75,88	75,90	76,28	77,22
<b>Jawa Timur</b>	<b>71,50</b>	<b>71,71</b>	<b>72,14</b>	<b>72,75</b>

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS), 2023

Pada tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 – 2022 mengalami peningkatan. Pada gambar tersebut pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur ialah Kota Surabaya menunjukkan angka sebesar 82,74 pada tahun 2022. Tidak hanya Kota Surabaya yang memiliki kategori sangat tinggi, tetapi Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten dengan kategori nilai tinggi yang nilainya stabil setiap tahunnya. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kota Surabaya semakin baik. Karena kategori nilai IPM > 80 termasuk kedalam kategori sangat tinggi, Nilai IPM 70 – 79 memiliki kategori tinggi, sedangkan nilai IPM 60 – 69 termasuk kategori sedang (Badan Pusat Statistik, 2022).

Salah satu wilayah yang kategori sedang yaitu Kabupaten Sampang yang rata-rata nilainya 63,39 per tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang, karena masyarakat di Kabupaten Sampang masih mengutamakan adat dan budaya yang lebih fokus ke sekolah agama atau pondok pesantren. Sehingga pendidikan formal didaerah tersebut tertinggal atau terabaikan. Ada pula beberapa masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi lalu memutuskan untuk merantau agar tidak tertinggal. Selain itu terdapat dalam aspek standar hidup layak atau ekonomi Kabupaten Sampang memiliki nilai terendah yaitu sebesar 5,33%, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengangguran yang tinggi. Pengangguran yang tinggi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mencari pekerjaan.

Untuk permasalahan selanjutnya dapat dilihat dari aspek kesehatan yang pencapaiannya juga masih rendah. Salah satunya tingginya tingkat kematian bayi yaitu 58,92 per 1000 kelahiran hidup. Perlunya dorongan dari pemerintah untuk memfasilitasi rakyat agar mampu untuk merubah pola hidupnya agar lebih sehat (Sunnygono et al., 2018).

Untuk itu, alasan memilih IPM sebagai variabel terikat dalam penelitian ini untuk mengukur kesejahteraan suatu wilayah atau negara secara holistic atau dengan sudut pandang yang menyeluruh yang artian keseluruhan masyarakat yang yang tercakup dalam 3 indikator Indeks Pembangunan Manusia.

**Tabel 1.2 Gambar Realisasi Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2019-2022**

Tahun	Retribusi Daerah	DAU	DAK	IPM
	Dalam Miliar			
2019	189,15	100	93,58	71,5
2020	77,27	99,56	94,14	71,71
2021	96,86	100	78,18	72,14
2022	118,33	100	91,37	72,75

*Sumber: Data diolah*

Pada tabel realisasi retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan data indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2022. Realisasi retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus menunjukkan nilai yang stabil pada setiap tahunnya. Peningkatan variabel retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus setiap tahunnya diikuti dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Tetapi pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mengalami penurunan pada tahun 2020 untuk dana alokasi umum sedangkan dana alokasi khusus mengalami penurunan pada tahun 2021 hal itu tidak mempengaruhi terjadinya penurunan pada indeks pembangunan manusia.

Alasan penulis memilih judul dan lokasi penelitian tersebut karena dari judul tersebut terdapat relevansi yang tinggi dengan realitas lokal Provinsi Jawa Timur serta variable-variable tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya pembangunan di tingkat daerah-daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur, seperti pembangunan industri yang saat ini sedang berkembang. Menurut Disperindag Jawa Timur, sektor industri merupakan salah satu tulang punggung utama ekonomi Jawa Timur dengan jumlah industri sebesar 833.726 unit usaha serta menyerap 3,26 tenaga kerja yang juga memiliki peran penting dalam pembentukan kinerja ekonomi daerah (Disperindag Jatim, 2022).

Selain itu, pemilihan Provinsi Jawa Timur juga dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah utamanya pada Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Timur yang pada saat ini angka realisasinya melampaui target yang ditetapkan, dari target sebesar Rp 32,82 Triliun saat ini mencapai sebesar Rp 33,59 Triliun (Bapenda Jatim, 2024). Hal ini yang membuat peneliti menjadi tertarik dengan objek penelitian untuk mengamati dinamika pertumbuhan perekonomian yang berada di Jawa Timur dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu penulis juga telah memilih kriteria dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yaitu ada 15 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam "GERBANGKERTASUISLA" dan "SELINGKAR WILIS" alasan memilih dua kawasan tersebut karena Kabupaten dan Kota tersebut merupakan dua Kawasan yang menjadi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dimasa mendatang (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2019).

## Kajian Teori

### Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, retribusi merupakan pemungutan/tarikan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas pelayanan atau perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemberlakuan otonomi daerah mempunyai konsekuensi yang signifikan terhadap pengelolaan daerah. Daerah Otonomi ditandai dengan desentralisasi keuangan, dimana daerah tersebut memiliki kewenangan yang tinggi mengenai pengelolaan keuangan. Di era otonomi ini, daerah diminta memperkuat otonomi (keuangan) untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah (Sunarto & Y Sunnyoto, 2016).

Fungsi dari Retribusi yaitu mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Fungsi ini diukur menurut tujuan yang ditetapkan dalam pemungutan retribusi daerah. Jika tujuan tersebut tercapai maka kontribusi retribusi terhadap PAD juga akan meningkat. Berikut beberapa contoh fungsi distribusi daerah langsung: Mekanisme Stabilitas Perekonomian Daerah: Masuknya retribusi ke kas daerah secara teratur akan menempatkan perekonomian daerah pada posisi stabil karena biaya operasional pemerintah daerah dibiayai oleh retribusi tersebut (Lianda & Priantana, 2021).

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang didistribusikan untuk menyeimbangkan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja dalam rangka desentralisasi. Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan yang melalui penrumusan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah (Harahap, 2017).

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada setiap daerah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangannya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Transfer dari pemerintah pusat ke daerah ini diberikan sebagai hibah tanpa syarat, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggunakannya berdasarkan prioritas dan kebutuhannya. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kapasitas pengelolaan sumber dayanya. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, daerah dapat lebih fokus memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai belanja modal yang mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik (Nurzen & Riharjo, 2016).

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya dialokasikan ke masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan khusus di wilayah tersebut sesuai dengan prioritas nasional dengan cara mempertimbangkan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada setiap daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik (Waskito et al., 2019).

Sesuai dengan undang-undang No 23 Tahun 2014 dan Pasal 40 undnag-undnag No 33 Tahun 2004, pemerintah menetapkan tiga kriteria Dana Alokasi Khusus sebagai berikut:

1. Kriteria umum ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Kriteria khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan peraturan daerah (Riviando et al., 2019).

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia sering dikaitkan dengan sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia ada dua aspek penting yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Kedua aspek tersebut adalah pendidikan aspek dan aspek kesehatan. Aspek pendidikan dan kesehatan menjadi landasan pembangunan. Aspek pendidikan memberikan peranan penting dalam pembangunan dan pembangunan suatu negara, sedangkan aspek kesehatan merupakan prasyarat peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama pertumbuhan dan perkembangan (Utami & Gunawan, 2023).

## Metode Penelitian

### 3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti ialah metodologi penelitian kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari suatu populasi atau sampel yang diminati. Umumnya, teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara yang acak, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis kuantitatif atau statistik dari data yang dikumpulkan dimaksudkan untuk mendukung hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen (Sugiyono, 2017).

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder data-datanya yang meliputi Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2022. Informasi tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK KemenKeu) (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>), serta adanya tambahan data pendukung yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.bps.go.id/>).

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

#### 3.3.1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam tinjauan pustaka melibatkan proses pengumpulan informasi atau data dari bermacam-macam sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Topik penelitian bergantung pada database perpustakaan, jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, atau publikasi lainnya. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi, kualitas, dan keselarasan dengan tujuan penelitian.

#### 3.3.2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang dimana data tersebut diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh BPS dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Nilai Tukar dan Mata Uang Kementerian Keuangan (DJPK KemenKeu). Sumber data antara lain yaitu:

1. Data realisasi anggaran Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang di peroleh dari website resmi DJPK KemenKeu.
2. Data Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistika Jawa Timur.

### 3.4. Teknik Analisa Data

#### 3.4.1. Regresi Data Panel

Metode analisis data panel merupakan analisis regresi yang menggunakan struktur data panel yang menggabungkan data time series dan cross-sectional, dengan sampel cross-sectional yang diambil pada titik waktu yang berbeda (Rasu, Kumenaung, and Koleangan 2019). dapat diilustrasikan dengan fungsi berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

a = Konstanta

X<sub>1</sub> X<sub>2</sub> X<sub>3</sub> = Variabel Independen

i = *Cross Section*

t = *Time Series*

β<sub>1</sub> β<sub>2</sub> β<sub>3</sub> = Koefisien Regresi

e = *error term*

Untuk dapat memilih model terbaik dapat dilakukan beberapa tahapan pengujian yaitu sebagai berikut:

1. Uji Chow, Uji Chow adalah alat statistik yang digunakan untuk memilih model yang paling tepat, apakah model *Common Effect* atau model *Fixed* (Hamza & Agustien, 2019).
2. Uji Hausman, pengujian hausman ini membandingkan *Random Effect Model* (REM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam menentukan model terbaik dalam pemilihan model (Curry & Banjarnahor, 2018).
3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM), merupakan uji untuk mengetahui Manakah model yang terbaik anatar *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM) sebagai model terbaik.

#### 3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali dalam (Widiani et al., 2022) uji asumsi klasik merupakan uji yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil analisis regresi tidak menyimpang dari model dan memenuhi estimasi. Salah satu persyaratan statistik yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis regresi berganda adalah uji asumsi klasik. Berikut jenis asumsi klasik yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Multikolonieritas, uji ini dilakukan jika regresi linear lebih dari satu variable independen. Karena dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen maka uji multikolonieritas diperlukan dalam pengujian ini.
2. Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya variansi yang tidak sama antara varian yang berbeda dalam suatu model regresi (Rustiana Marheni & Eko Triyanto, 2023). Apabila varians dari pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain sama, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan variansnya berbeda disebut heteroskedastisitas.

### 3.5. Pengujian Hipotesis

#### 3.5.1. Uji F

Pengujian ini dimaksudkan untuk membantu mengetahui apakah suatu variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Apabila  $f$  hitung lebih besar dari  $f$  tabel untuk tingkat angka signifikan sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan akan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan ambang batas signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) (Mardiatmoko, 2020).

#### 3.5.2. Uji-t (Parsial)

Uji parsial disebut juga uji t-statistik, digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas, baik secara individu atau parsial, terhadap variabel terikat, dengan tujuan merumuskan hipotesis yang konsisten tentang variabel terikat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel independen. Jika nilai t-hitung  $>$  t-tabel, maka hipotesis menyatakan hipotesis tersebut diterima secara parsial. Analisis dilakukan dengan menggunakan ambang batas signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) (Fitriana & Gresya, 2021).

#### 3.5.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Kualitas regresi ditentukan oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ). Secara sistematis, nilai determinasi merupakan kuadrat koefisien korelasi ( $r$ ). Karena nilai ( $R^2$ ) yang sering *over estimate* atau dilebih-lebihkan, ada beberapa teknik statistik mungkin dapat mereduksi ( $R^2$ ) yang berkorelasi (*adjusted  $R^2$* ). Saat menentukan keterikatan suatu variabel, nilai determinasi memberikan beberapa informasi dasar variabel yang signifikan. Penentuan tersebut berkisar antara 0% hingga 100%. Semakin mendekati 100% maka indikator ketelitian regresi yang lebih baik (Jannah, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Gambaran Umum

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang termasuk dalam perubahan pertumbuhan otonomi daerah, hal tersebut menjadikan daerah untuk lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Provinsi Jawa Timur sendiri pada saat ini menduduki kategori provinsi yang memiliki penduduk terbanyak di Pulau Jawa. Menurut data yang tercatat saat ini Provinsi Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2023).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sebanyak 15 Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. 15 Kabupaten dan Kota yang dipilih merupakan Kabupaten atau Kota yang memasuki era percepatan ekonomi nasional yaitu GerBangKertoSuSiLa yang terdiri dari (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) dan Selingkaran Wilis yang merupakan daerah-daerah dikawasan gunung wilis yang saat ini sedang melakukan perkembangan perekonomiannya diantaranya (Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Nganjuk, Kediri, Kota Kediri, Madiun, Kota Madiun) (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2019).

### 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian bab pendahuluan telah dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan menggunakan keseluruhan data time series dan cross section data termasuk data realisasi retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan data indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan mencakup 15 kabupaten/kota dengan jumlah 60 data yang terdiri dari 15 kabupaten dan kurun waktu selama 4 tahun. Data penelitian yang didapat oleh peneliti terdapat pada web site resmi DJPK KemenKeu dan Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur.

### 4.3. Analisis Model

#### 4.3.1. Uji Regresi Data Panel

Sebelum melakukan uji hipotesis dan asumsi klasik maka dilakukan uji ketepatan model regsi yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model dan Random Effect Model (REM) dengan cara melalui Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (LM), sebagai berikut:

1. Uji Pemilihan Model
  - a. Uji Chow

**Tabel 4.1 Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: FEM  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	281.700946	(14,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	273.169622	14	0.0000

Sumber : data pengelolaan Eviews 10 (2024)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai prob.  $< 0,05$  yaitu sebesar  $0.0000 < 0,05$ . Jadi apabila prob.  $< 0,05$  model yang dipilih adalah fixed effect model dari pada common effect model, Maka peneliti menggunakan model yang tepat yaitu fixed effect model.

- b. Uji Hausman

**Tabel 4.2. Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: REM  
Test cross-section random effects



Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.530457	3	0.0036

Sumber: data pengelolaan evIEWS 10 (2024)

Berdasarkan tabel uji hausman diatas diperoleh nilai prob.  $< 0,05$ , yaitu sebesar  $0.036 < 0,05$ . Jadi apabila prob.  $< 0,05$  model yang dipilih ialah fixed effect model dari pada random effect model, maka dari itu model yang akan dipilih ialah fixed effect model (FEM).

#### 4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk tahap selanjutnya setelah menentukan model mana yang terbaik yaitu dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji multikolonieritas dan heterokedastisitas.

##### 1. Uji Multikolonieritas

**Tabel 4.3. Uji Multikolonieritas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.356464	0.139372
X2	0.356464	1.000000	0.846690
X3	0.139372	0.846690	1.000000

Sumber: data pengelolaan evIEWS 10 (2024)

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi yaitu apabila nilai VIF  $< 10$  dan tolerance  $> 0,01$  sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. Maka dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF setiap variabel memiliki nilai VIF  $< 10$  maka, data tersebut tidak terjadi multikolonieritas atau terbebas dari multikolonieritas.

##### 2. Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4.4. Uji Heterokedastisitas**

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 02/23/24 Time: 19:56  
 Sample: 2019 2022  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 15  
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.415949	0.109580	3.795857	0.0004
X1	0.000630	0.000409	1.538470	0.1296
X2	-0.000181	0.000223	-0.814276	0.4189
X3	1.99E-05	0.000847	0.023515	0.9813
R-squared	0.062574	Mean dependent var		0.281938
Adjusted R-squared	0.012355	S.D. dependent var		0.206521
S.E. of regression	0.205241	Akaike info criterion		-0.264924
Sum squared resid	2.358935	Schwarz criterion		-0.125301
Log likelihood	11.94772	Hannan-Quinn criter.		-0.210310
F-statistic	1.246020	Durbin-Watson stat		2.382092
Prob(F-statistic)	0.301763			

Sumber: data pengelolaan evIEWS 10 (2024)

Berdasarkan tabel uji heterokedastisitas diatas diperoleh dari masing-masing variabel memiliki nilai prob. lebih besar dari 0,05. Jadi Apabila nilai prob. > 0,05 maka penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4.3.3. Uji Hipotesis

Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis yang berupa Uji F, uji t (parsial), dan uji koefisien determinasi, sebagai berikut:

##### 1. Uji F

**Tabel 4.5 tabel Uji F**

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.994624	Mean dependent var	74.66333
Adjusted R-squared	0.992448	S.D. dependent var	4.792813
S.E. of regression	0.416497	Akaike info criterion	1.329451
Sum squared resid	7.285739	Schwarz criterion	1.957755
Log likelihood	-21.88354	Hannan-Quinn criter.	1.575215
F-statistic	457.1080	Durbin-Watson stat	1.852844
Prob(F-statistic)	<b>0.000000</b>		

Sumber: data *pengeolaan evirvs 10 (2024)*

Berdasarkan tabel hasil uji F diatas bahwa hasil uji F memiliki nilai prob. sebesar 0.000000 dimana prob. tersebut  $0.000000 < 0.05$ . Hal tersebut menunjukkan keputusan bahwa  $H_4$  diterima jadi, menunjukkan bahwa antar variabel retribusi daerah ( $X_1$ ), dana alokasi umum ( $X_2$ ) dan dana alokasi khusus ( $X_3$ ) berpengaruh secara simultan yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).

##### 2. Uji-t (Parsial)

**Tabel 4.6. Tabel Uji-t (Parsial)**

Dependent Variable: Tabel FEM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 03/01/24 Time: 11:46  
 Sample: 2019 2022  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 15  
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	79.61849	1.274258	62.48226	0.0000
X1	0.003451	0.003016	1.143918	<b>0.2591</b>
X2	-0.006715	0.001343	-5.001476	<b>0.0000</b>
X3	0.006788	0.002109	3.218867	<b>0.0025</b>

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.994624	Mean dependent var	74.66333
Adjusted R-squared	0.992448	S.D. dependent var	4.792813
S.E. of regression	0.416497	Akaike info criterion	1.329451
Sum squared resid	7.285739	Schwarz criterion	1.957755
Log likelihood	-21.88354	Hannan-Quinn criter.	1.575215
F-statistic	457.1080	Durbin-Watson stat	1.852844
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data *pengelolaan eviervs 10 (2024)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji-t yaitu,

- a.  $X_1$  memiliki nilai prob.  $> 0.05$  yaitu prob. sebesar  $0.2591 > 0.05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa  $H_1$  di tolak, maka  $H_0$  diterima yang berarti retribusi daerah ( $X_1$ ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).
  - b. Pada  $X_2$  memiliki nilai prob.  $< 0,05$  yaitu nilai prob. nya sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Hal tersebut menunjukkan keputusan bahwa  $H_2$  diterima jadi, dana alokasi umum ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).
  - c. Selanjutnya berdasarkan tabel uji-t diatas  $X_3$  memiliki nilai prob.  $< 0.05$  yaitu nilai prob. nya sebesar  $0.0025$ . Hal tersebut menunjukkan keputusan bahwa  $X_3$  diterima jadi, dana alokasi khusus ( $X_3$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).
3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 4.7. Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.994624	Mean dependent var	74.66333
Adjusted R-squared	0.992448	S.D. dependent var	4.792813
S.E. of regression	0.416497	Akaike info criterion	1.329451
Sum squared resid	7.285739	Schwarz criterion	1.957755
Log likelihood	-21.88354	Hannan-Quinn criter.	1.575215
F-statistic	457.1080	Durbin-Watson stat	1.852844
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data pengelolaan evIEWS 10 (2024)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.992448 atau 99,2448% nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mampu menjelaskan variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur 99,2448%, sedangkan 0,7552% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.

## Pembahasan

Dari hasil uji didapatkan analisa sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal tersebut disebabkan karena ada nilai retribusi daerah yang rentangnya sangat jauh, dapat dibuktikan pada hasil analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata retribusi daerah ( $X_1$ ) senilai 46,00, dengan nilai terendahnya atau minimumnya sebesar 7,99 dan nilai tertinggi atau maksimumnya sebesar 396,24, serta nilai probabilitas dalam uji parsial lebih besar dari signifikansi. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa, ketika tingkat retribusi daerah meningkat maka tidak akan berakibat pada indeks pembangunan manusia.

Pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Williantara, 2016) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini juga berbanding terbalik dengan teori federalisme fiskal yang menjelaskan mengenai hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang dalam penerapannya untuk meningkatkan efektivitas suatu daerah, desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui sumber pendapatan yang mandiri untuk mengembangkan perekonomian mereka. Pemerintah daerah mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengatur urusan mereka sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola (Taslim & Pratama, 2021).

Maka tidak berpengaruhnya retribusi daerah (pendapatan asli daerah) terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur menurut Gede Ferdi williantara dkk menyatakan bahwa ketika pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia berarti pemerintah daerah kurang dalam mengalokasikan rasio pendapatan asli daerah, yang dalam artian pendapatan asli daerah lebih banyak dikeluarkan untuk membiayai kegiatan belanja pegawai dan biaya langsung lainnya dari pada untuk membiayai kepentingan publik. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui laporan DPRD Provinsi Jawa Timur, bahwa dana cadangan belanja pegawai terlalu tinggi, yang seharusnya dalam peraturan yang idealnya hanya 2,5 persen tetapi pada Pemprov Jawa Timur dana cadangannya mencapai 6 persen, sehingga dana tersebut menjadi SilPa dan tak terserap. Apabila dibiarkan seperti ini maka akan dapat merugikan masyarakat karena pembangunan dapat terhambat (Lutiyu Handi, 2022).

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hasil hipotesis Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap IPM menghasilkan koefisien regresi dan tingkat signifikan sehingga secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Teori yang cocok untuk keterkaitan antar variabel ini yaitu, *theory stewardship*. Yang menjelaskan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan keuangan antar daerah. Dengan adanya teori *Stewardship* diharapkan penggunaan Dana Alokasi Umum yang efektif dan transparan dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Hasil tersebut di dukung oleh penelitian dari (Lestari et al., 2019) menyatakan bahwa secara keseluruhan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM di Kab/Kota Eks Karesidenan Kedu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Sejalan dengan penelitian (Saswatata & Parju, 2022), dengan judul penelitian Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang menunjukkan bahwa Dana alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pada hasil penelitian diatas Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap IPM, karena menurut peneliti Dana Alokasi Umum (DAU) menyediakan sumber dana yang signifikan bagi pemerintah daerah. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor-sektor lain yang berkontribusi pada pembangunan manusia.

## 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil yaitu dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, maka dapat dijelaskan bahwa kenaikan nilai dana alokasi khusus mampu menaikkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini sejalan dengan teori dari Donaldson dan David *Theory Stewardship* yaitu, Pengalokasian Dana alokasi khusus sering kali diberikan untuk proyek-proyek tertentu yang dianggap krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Gunawan, 2023) dengan judul *Analysis Effect Of Profit-Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Spending Social Assistance And Capital Expenditure On Human Development In Eastern Indonesia* dengan menyatakan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tetapi penelitian ini justru berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2017), yang pengujian diperoleh hasil bahwa dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2017) terjadi karena pada penelitian tersebut Peneliti keterbatasan dalam menggali informasi secara detail karena rentang waktu yang sangat pendek. Selain itu, Data Dana Alokasi Khusus pada penelitiannya tidak memisahkan alokasi perbidang sehingga bidang mana saja yang termasuk indikasi Indeks Pembangunan Manusia belum diketahui.

#### 4. Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap IPM

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil hipotesis variabel retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia menghasilkan koefisien dan tingkat signifikan sehingga secara simultan (bersamaan) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini relevan dengan teori welfare of state yaitu, mempelajari bagaimana kebijakan publik, teori yang menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas.

Pada penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari (Saswatata & Parju, 2022) dengan judul *Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang*, menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) dengan judul *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap IPM Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016*, menyatakan bahwa ketiga variabel independent (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) berpengaruh secara signifikan dan memiliki nilai yang positif terhadap IPM.

Hubungan antara temuan penelitian di atas dengan penelitian saat ini menunjukkan adanya konsistensi atau validitas yang kuat pada variabel tersebut di atas. Selain itu, terdapat korelasi antar variabel yang dapat menyebabkan kesinambungan dalam temuan tersebut.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada variabel retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai signifikansi lebih besar sehingga  $H_1$  di tolak dan  $H_0$  di terima. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dengan nilai signifikansi lebih kecil, sehingga  $H_2$  di terima yang artinya, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dengan nilai signifikansi lebih kecil, sehingga  $H_3$  di terima yang artinya, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dengan nilai signifikansi lebih kecil, sehingga  $H_4$  diterima yang artinya Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## Referensi

- Arezda, B. (2022). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. *remik*, 6(4), 1013–1023. <https://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11909>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia. *BPS: Jawa Timur*.
- Bapenda Jatim. (2024). Realisasi Pendapatan Provinsi Jatim TA 2023 Lampau Target. *Bapenda.Jatim.Prov.Go.Id*. <https://bapenda.jatimprov.go.id/blog/berita/realisasi-pendapatan-provinsi-jatim-ta-2023-lampau-target>
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2023). PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR. *Jatim.Bpk.Go.Id*. <https://jatim.bpk.go.id/provinsi-jawa-timur/>
- Curry, K., & Banjarnahor, E. (2018). FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI GO PUBLIC DI INDONESIA. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 207–221. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.2722>
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2019, December 18). Proyek Pembangunan Selingkar Wilis Ditetapkan Jadi Kawasan Strategis. *Kominfo.Jatimprov.Go.Id*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umumproyek-pembangunan-selingkar-wilis-ditetapkan-jadi-kawasan-strategis>
- Disperindag Jatim. (2022). Disperindag Jatim Siapkan Strategi Songsong 2023, Dorong Peningkatan Kinerja Ekonomi. *Disperindag.Jatim.Prov.Go.Id*. <https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=disperindag-jatim-siapkan-strategi-songsong-2023-dorong-peningkatan-kinerja-ekonomi>
- Eko. (2023). Realisasi Penerimaan Pajak Sidoarjo Capai Rp 1,251 Triliun [https://suryakabar.com/2023/12/18/realisasi-penerimaan-pajak-sidoarjo-capai-rp-1251-triliun/]. *Suryakabar.Com*.
- Fitriana, A., & Gresya, H. (2021). *ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEBIJAKAN DIVIDEN RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN*.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Harahap, R. U. (2017). *PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KAB./KOTA PROPINSI SUMATERA UTARA*. 1(1).
- Jannah, M. (2019). *PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KINERJA UMKM BATIK GEDOG KHAS TUBAN*. 5(1).
- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). *ANALISIS PENGARUH DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN KEDU TAHUN 2012-2016*.
- Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). *ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH*. 2.
- Lutiyu Handi. (2022). PAD 2023 Diproyeksi Rp 18,1 T, DPRD Jatim Minta Dioptimalkan. *DPRD PROVINSI JAWA TIMUR*. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/11689/pad-2023-diproyeksi-rp-181-t-dprd-jatim-minta-dioptimalkan>
- Mardiatmoko, G.-. (2020). PENTINGNYA UJI ASUMSI KLASIK PADA ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Martini, R. R., & Zailah. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 90–95.
- Muqorrobin, M. (2017). *PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR*.
- Novarianti, N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemeditasi Pada Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2013. *Jurnal Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*.
- Nurzen, M., & Riharjo, I. B. (2016). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL*. 5.

- Putriani, E. (2016). *PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BULUKUMBA*.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.52>
- Rustiana Marheni & Eko Triyanto. (2023). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4223–4240. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6130>
- Saswatata, S. S., & Parju, P. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. *Serat Acitya*, 11(1), 17. <https://doi.org/10.56444/sa.v11i1.2953>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung : Alfabeta.
- Sunarto, & Y Sunyoto. (2016). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMADIRIAN DAERAH YANG BERDAMPAK PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 23.
- Sunyigono, A. K., Ekawati, R., & Hayati, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Tergusur Akibat Pembangunan Bendungan Nipah-Sampang Madura Melalui Pengembangan Kawasan Desa Wisata Syariah. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 4(2). <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v4i2.4940>
- Taslim, F. A., & Pratama, R. (2021). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA*. 4(2).
- Utami, R. D., & Gunawan, D. S. (2023). *ANALYSIS EFFECT OF PROFIT-SHARING FUNDS, GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS, SPENDING SOCIAL ASSISTANCE AND CAPITAL EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA*.
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/rab.030247>
- Widiani, D., Zahro, N. I., & Susanti, D. A. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*.
- Williantara, G. F. (2016). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. . . *September*.